

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami – isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.¹⁵

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma agama maupun norma hukum dan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan proses yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan yang menentukan akibat hukumnya dinamakan dengan hukum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”.

¹⁵ Martiman Pradjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan. Indonesia Legal Center Publishing. Hlm 1.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Substansi pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapaun asas-asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Asas monogami. Asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila di penuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku I hukum perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghalidan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Bentuk Perkawinan di Indonesia

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang majemuk atau heterogen, bangsa Indonesia mempunyai beraneka ragam suku, budaya, agama, adat istiadat (tradisi). Semua itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia salah satunya mengenai perkawinan

Bagi masyarakat adat perkawinan merupakan masalah yang menyangkut seluruh persekutuan masyarakat adat. Perkawinan menjadi persoalan keluarga di daerah-daerah dimana terdapat tertib parental, dan perkawinan menjadi persoalan family, keturunan, dan klan terutama pada masyarakat adat yang menganut garis keturunan matrilineal dan patrilineal. Susunan pertalian parental, matrilineal, dan patrilineal menjadi landasan aturan dalam perkawinan seperti larangan perkawinan dengan orang-orang tertentu. Pada tertib sanak bertali satu larangan perkawinan dengan famili terdekat memiliki sifat yang istimewa. Berkaitan dengan perkawinan, masyarakat adat mengenal kawin lari, kawin jujur, dan perkawinan dengan pembayaran lain.¹⁶

Membicarakan perkawinan di Indonesia maka sangat erat kaitannya dengan sistem keturunan, sistem keturunan yang ada dimasyarakat hukum adat Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis sistem keturunan yaitu:

1. Masyarakat ke-Ibuan (masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis keturunan Ibu)

¹⁶ Lastuty Abu Bakar. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013. Hlm 7.

Adapun masyarakat dengan garis keturunan ibu yang terkenal sebagai contoh adalah masyarakat Minangkabau. Bahwa di minangkabau ada 3 (tiga) bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu:

- a. Kawin bertandang
- b. Kawin menetap
- c. Kawin bebas

2. Masyarakat ke-Bapakan (masyarakat dengan garis keturunan Bapak)

Pada umumnya masyarakat Kebapakan/Patrilineal perkawinan memakai sistem perkawinan kawin jujur. Masyarakat kebapakan adalah suatu masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kepakian yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah atau laki-laki. Sebagai konsekuensinya diadakanlah suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis kebapakan itu, yaitu kawin jujur atau sering disebut eksogami jujur. Ini berarti suatu keharusan laki-laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat magis-religius, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dimasukkan kedalam klan suami dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas dilingkungan keluarga suami.

Pada tertib patrilineal dikenal perkawinan jujur, yaitu perkawinan dengan membayar jujur, atau mas kawin dari pihak laki-laki untuk melepaskan calon pengantin perempuan dari keluarganya dan untuk dimasukan dalam golongan keluarga pihak laki-laki. Pada perkawinan jujur dikenal pula perkawinan

dengan pembayaran jasa, yaitu pembayaran mas kawinnya ditunda dimana mempelai pria bekerja pada mertuanya sehingga utang jujurnya terbayar lunas. Berkenaan dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat patrilineal, maka saat ini anak-anak perempuan cenderung memiliki kedudukan dan hak waris yang sama dengan laki-laki.¹⁷

Kawin Jujur mengandung tiga segi pengertian:

- a. Yuridis: perubahan status,
 - b. Sosial: mempererat hubungan antar klan, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan;
 - c. Ekonomis: adanya pertukaran barang.
3. Masyarakat Bilateral atau Parental terbagi dalam 2 (dua) kategori :
- a. Masyarakat Bilateral Jawa
Masyarakat Jawa yang menganut sistem garis keturunan ibu dan bapak adalah berdasarkan keluarga/ezin, yaitu suatu unit terkecil yang dalam keseluruhannya merupakan sebuah desa. Adapun sistem perkawinannya disebut kawin bebas artinya orang boleh kawin dengan siapa saja sepanjang hal itu diizinkan sesuai dengan kesusialaan setempat disepanjang peraturan yang digariskan oleh agama.
 - b. Masyarakat Bilateral Kalimantan
Masyarakat keibubapakan di Kalimantan (Borneo) ialah masyarakat dengan sistem perkawinan endogami, dalam arti mereka mengadakan

¹⁷ *Ibid.*

perkawinan satu sama lain didalam Tribe mereka sendiri (antar keluarga).

Adapun beberapa alasan mengapa mereka mengambil sistem endogami ini, yaitu:

1. Dipandang dari sudut keamanan, pertahanan
2. Dipandang dari sudut peilikan tanah, kebun, sawah dan sebagainya
3. Dipandang dari sudut kemurnian darah/keturunan dan lain-lain pantangan yang bersifat magis religius.¹⁸

B. Tinjauan tentang Perceraian

1. Pengertian perceraian

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas Putusan Pengadilan”.

Menurut Dariyo perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁹

Baik suka maupun tidak suka (like or dislike), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami isteri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian,

¹⁸ Bushar Muhammad. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta. PT Pradnya Paramita. Hlm 29.

¹⁹ Putri Rosalia Ningrum. 2013. *Perceraian Orang Tua dan Penyesuaian diri Remaja*. E-journal Psikologi Volume 1 Nomor 1 2013:69-79. Hlm 74.

keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga.

Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian. Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depressi dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut.²⁰

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan

²⁰ Agoes Dariyo. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Berkeluarga*. Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004. Hlm 94.

ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.²¹

Abdul ghofur anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) hal kemungkinan, sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut “khulu’.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau isteri yang

²¹ Muhammad Syaifuddin.(et.al). 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 16.

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.²²

2. Sebab – sebab Terjadinya Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No.9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²² *Ibid* hlm 18

3. Akibat Perceraian

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/isteri dan harta bersama²³. Selain itu ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur didalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sedangkan akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur didalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

²³ Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. CV Mandar Maju. Hlm 187.

C. Tinjauan Tentang Pewarisan

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu Al-miirats, bentuk masdar dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan, yang artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna al-miirats menurut istilah adalah hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.²⁴

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ikhwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Pewarisan berdasarkan undang-undang, juga disebut pewarisan ab-in-testato. Dan (2) Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan yang berdasarkan suatu testamen. Di dalam BW, pewarisan

²⁴ Nur Muhammad Kasim. Artikel : *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Hlm 4.

berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan testamentair yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan ab-intestato berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur, tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan itu.²⁵

Menurut Idris Djakfar dan Taufik yahya bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut Faraidl

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.²⁶

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Mendefinisikan : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris”. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan : “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada yang masih hidup.”

²⁵ Ibid

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2005. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya. Airlangga University Press. Hlm 3.

Soepomo menyatakan :

“hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses ini telah terjadi mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia.”

Para umumnya para penulis hukum sependapat bahwa, “hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tata cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.”²⁷

Di Indonesia sendiri terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris barat, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri.

1. Hukum Waris Barat

Hukum waris yang berlaku bagi non muslim, termasuk warga negara Indonesia, baik keturunan Tionghoa maupun Eropa yang mana ketentuannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris islam yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama islam dan di atur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Eman Suparman. 2007. *Hukum Waris dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm 3.

3. Hukum Waris Adat

Hukum adat yang berlaku di Indonesia berlaku di tiap-tiap golongan masyarakat, hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang berlaku dalam suatu daerah tertentu dengan disertai sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Hukum waris adat sendiri banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan.

2. Sistem Hukum Pewarisan Adat di Indonesia

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.²⁸

Istilah waris berasal dari bahasa Arab sebagai bahasa (Islam) dan kemudian telah menjadi bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian istilah "waris" diadopsi oleh hukum adat.

Adat mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Aturan (perbuatan) yang lazim dituruti atau diakukan sejak dahulu kala;
- b. Kebiasaan, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan;

²⁸ *Ibid.*

- c. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.

Istilah hukum adat (Adat Recht-Belanda) atau Adat Law (Inggris) pertama kali diciptakan oleh Snouck Hurgronje 1893. Pada dasarnya hukum adat itu bersumber pada;

- a. Volksrecht atau hukum rakyat;
- b. Hukum adat benormakan hukum Islam dan hukum Cannoniek (hukum Gereja);
- c. Hukum yang benormakan adat kebiasaan daerah atau pranata dari daerah (Kraton I Istana: Yogyakarta, Surakarta, Bali).

Kesimpulannya "hukum adat" adalah pada dasarnya adat kebiasaan yang menimbulkan akibat hukum. Karena di dalam hukum adat juga' mengatur tentang masalah kewarisan, di samping masalah-masalah lainnya, maka di dalam konteks ini secara khusus disebut dengan hukum waris adat.²⁹

Hilman Hadikusuma merumuskan : “Bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.”

²⁹ Urmansyah Alie. 2004. *Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Perspektif Perbandingan*. Jurnal Hukum No.26 Vol 11 Mei 2004. Hlm 168.

Ter Haar menyatakan : “...bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan para sarjana tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hukum waris adat tersebut setidaknya ada 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Ada subyek yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan kelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
- b. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud.
- c. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo proses itu tidak menjadi ‘akuut’ oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut.³⁰

Dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hukum waris adat yaitu:

1. Adanya pewaris maka yang dimaksudkan adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.

³⁰ *Op.cit.* Dominikus Rato Hlm. 123.

2. Adanya harta waris adalah semua harta baik materiil (yang berwujud) yang di tinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.
3. Adanya ahli waris adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris.³¹
4. Adanya proses peralihan sejumlah harta benda proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi 'akuut' oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut.

3. Sistem Kekerabatan di Indonesia

Pada masyarakat Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yaitu :

- a. Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
- b. Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan

³¹ J.Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung. Alumni. Hlm 8.

- c. Sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.³²

Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Menurut Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan, yaitu:

1. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam *clan* ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuannya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam system patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang;
2. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibu-nya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknya itu; dan

³² Hilman Hadikusuma. 1999. *Hukum Waris Adat*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 7.

3. Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya maupun kepada ayahnya³³

Sistem kekerabatan mempunyai arti penting dalam banyak masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju, hubungan dengan nenek moyang dan kerabat adalah kunci hubungan dalam struktur sosial. Hubungan dengan kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai interaksi, kewajiban-kewajiban, loyalitas, dan sentimen-sentimen. Dalam masyarakat di mana loyalitas kekerabatan sangat penting pada kerabat menggantikan loyalitas pada yang lain. Artinya sistem kekerabatan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial yang dibangunnya lebih lanjut. Sistem kekerabatan menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, yaitu posisi laki-laki dan posisi perempuan³⁴

Di Indonesia, hukum adat memiliki sistemnya sendiri terutama berkenaan dengan kewarisan. Hukum adat waris memiliki 3 (tiga) sistem kewarisan yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental) Jawa. Di Jawa setiap anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan dari ayah,

³³ Komari. 2015. *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia : antara adat dan syariat*. Asy-syariah Vol 17 No.2, Agustus 2015. Hlm 159.

³⁴ Sri Meyanti dan Syahrizal. Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau. *Prosiding: International Conference on Indonesian Studies ISSN 2087-0019*. Unity, Diversity and Future, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bali, 9-10 Februari 2012. Hlm 2.

ibu atau kakek neneknya. Sistem pewarisan individual yang memberikan hak mewaris secara individual atau perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok.

b. Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan seperti di Minangkabau atau masyarakat *woe-woe* Ngadubhaga di Kabupaten Ngada-Flores.

c. Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri-ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau sebagian besar diwariskan hanya kepada satu anak saja. Seperti di Bali hanya di wariskan kepada anak laki-laki tertua atau di Tanah Semendo di Sumatera Selatan hanya diwariskan kepada anak perempuan tertua saja.

Sistem pewarisan mayorat;

1. Mayorat pria : anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Lampung, Bali, Irian Jaya)
2. Mayorat wanita : anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal, adalah waris tunggal (Tanah Semendo, Sumatera Selatan)
3. Mayorat wanita bungsu : anak perempuan terkecil/bgsu menjadi ahli waris ketika si pewaris meninggal (Kerinci).³⁵

³⁵ *Op.cit.* Dominikus Rato. Hlm 118.

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem itu dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam suatu bentuk susunan masyarakat dimana dapat dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas. Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.

D. Tinjauan Tentang Hukum Adat Bali

1. Hukum Adat Bali

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Mengingat peraturan-peraturan ini tidak tertulis, dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain bersifat tidak tertulis, hukum adat juga ada yang bersifat tercatat (*bescreven*)

seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerch*) seperti dokumentasi awig-awig Bali.³⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, awig-awig (hukum adat) diartikan sebagai “aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau karena banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing”

Dari pengertian awig-awig dapat pula dipahami bahwa *awig awig* adalah penjabaran dari filosofi *Tri Hita Karana*. Filosofi inilah sesungguhnya yang menjadi karakter Desa Adat/Pakraman yang membedakannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di luar Bali. Materi muatan *awig awig* tidak lain menyangkut aspek keagamaan atau *parahyangan* (hubungan kerama desa dengan tuhan), aspek kemasyarakatan atau *pawongan* (hubungan kerama desa dengan sesamanya sebagai individu maupun kelompok), dan aspek kewilayahan atau *pelemahan* (hubungan kerama desa dengan wilayahnya)³⁷

2. Sistem Kekerabatan di Bali

Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan di Bali berpegang pada prinsip Patrilineal yang menyebabkan sistem pertalian wangsa lebih di titikberatkan pada garis keturunan pria, maka kedudukan pria lebih di

³⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012. *Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Bali*. Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 3, Desember 2012.

³⁷ I wayan Gde Wiryawan, Ketut Sukawati (et.al). 2015. *Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi pembangunan dan Budaya Arus Global*. Universitas Mahasaraswat. Denpasar. Jurnal Bkakti Saraswati Vol 04 No 02 September 2015.

utamakan dari wanita. Pada umumnya yang berkembang di masyarakat Bali pria adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan wanita disiapkan untuk menjadi isteri orang lain dan memperkuat keturunan orang lain. Di Bali sendiri apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka dikatakan putus keturunan. Sistem kekerabatan di Bali adalah sebagai sistem keturunan patrilineal atau biasa disebut *purusa*.

Bali yang bersistem kekeluargaan *kapurusa* (patrilineal) menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami. Penempatan anak laki-laki sebagai ahli waris terkait erat dengan pandangan bahwa laki-laki Bali mempunyai tanggungjawab yang besar dalam keluarga, sementara tanggungjawab anak perempuan terhadap keluarga berakhir dengan kawinnya anak tersebut yang selanjutnya akan masuk dan menunaikan tanggungjawabnya secara total di lingkungan keluarga suami.³⁸

Itulah sebabnya, harapan yang sangat besar digantungkan kepada anak laki-laki, mulai dari harapan sebagai penerus generasi, memelihara dan memberi nafkah ketika orang tuanya sudah tidak mampu, melaksanakan upacara agama, seperti menyelenggarakan upacara kematian, penguburan atau pembakaran jenazah (*ngaben*) anggota keluarganya yang meninggal serta menyemayamkan dan memuja roh leluhur mereka di tempat persembahyangan

³⁸ *Ibid.*

keluarga (*sanggahmerajan*), menggantikan kedudukan bapaknya dalam masyarakat melaksanakan kewajiban (*swadharma*) sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat.

3. Perkawinan Adat di Bali Menurut Agama Hindu

Umat hindu mempunyai tujuan hidup yang disebut *Catur Purusa Artha* yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Moksa* hal ini dilakukan secara tahapan. Tahapan untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan hidup itu disebut dengan *Catur Asrama* (tahapan kehidupan). Pada tahap *Brahmacari asrama* tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan *Dharma*. *Grhasta Asrama* memprioritaskan mewujudkan *Artha* dan *Kama*. Pada umumnya tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non material. Unsur material adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan/perumahan (yang semuanya disebut *Artha*). Sedangkan unsur non material adalah rasa kedekatan dengan Hyang Widhi (yang disebut *Dharma*), kepuasan dalam berhubungan seks, kasih sayang antara suami-istri dan anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat (yang disebut *Kama*)

Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup *Grhasta Asrama*. Tugas pokok dari *Grhasta Asrama* adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan yang disebut "*Yatha sakti Kayika Dharma*" yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan *dharma*. Jadi seorang *Grhasta* harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan *dharma* dalam

kehidupan. Kemandirian dan profesionalisme inilah yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan

Dalam kalangan masyarakat hukum adat masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Menurut Hilman Hadikusuma suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkut paut dengan warisan kedudukan dan harta kekayaan.³⁹

Menurut hukum agama hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya di neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti.⁴⁰

Umat Hindu sebagai bagian warga Indonesia harus tetap mempertahankan tata aturan perkawinan karena perkawinan sebagai perbuatan suci yang mengandung sifat sakramen dan samskara. Tata aturan perkawinan erat kaitannya terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan.

³⁹ *Op.cit.* Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Hlm 187.

⁴⁰ I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2010. *Thesis Jurnal Hukum. Jurnal* Vol 4 No.1 September 2010.

Oleh karena itu dalam perspektif hukum Hindu, tata aturan ini harus ditegakkan dan diberlakukan antara lain : ⁴¹

1. Dasar Perkawinan

Dasar perkawinan yang paling penting ditaati adalah tentang sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan atau perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hukum Hindu menetapkan bahwa "samskara" adalah saat permulaan sahnya perkawinan. Dalam pelaksanaannya samskara ini nampak berbeda menurut tradisi setempat (*desa, kala, patra*), namun demikian perbedaan ini bukan perbedaan didalam hukumnya, tetapi hanya berbeda dalam variasi kultur estetisnya. Dasar yang harus diingat dalam samskara adalah wanita dan pria harus sudah dalam satu agama yaitu sama-sama beragama Hindu dan dalam upacara widiwidana yaitu pemberkahan keagamaan yang dipimpin oleh sulinggih atau pinandita. Pada waktu pengesahan mereka, perlu memperhatikan hal pokok seperti kedua belah pihak tidak terikat dalam perkawinan selain perkawinan yang akan dilaksanakan, memenuhi syarat umur dan tidak mempunyai hubungan darah dekat menurut agama atau sapinda.⁴²

⁴¹ I Made Kastama. 2010. *Penegakan Tata Aturan Perkawinan dalam Memasuki Masa Grihasta Asrama (Perspektif Hukum Agama Hindu)*. Tampung Penyang Volume VIII No.1 Januari 2010. Hlm 24.

⁴² *Ibid* hlm 25.

2. Syarat- Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Dalam Manawadharmastra Buku IX pasal 90 pada pokoknya menyatakan : *Trini warsanyudikseta, Kumaryrtumati sati, Urdhwam tu kaladeta, Smadwindeta sadrcampatim*. Yang artinya “walaupun telah cukup umur untuk kawin, tiga tahun lamanya wanita itu harus menunggu, tetapi setelah lewat tiga tahun itu biarlah ia sendiri memilih calon suaminya yang sewarna”.

Dengan demikian ini berarti orang tua harus menunggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat dikawinkan dengan calon suaminya. Orang tua wajib untuk mengawinkan anaknya, bersalahlah ayahnya karena tidak mengawinkan putrinya pada waktunya (Manawadharmastra IX 4 : 526)

Selanjutnya tata aturan perkawinan baik dalam hukum nasional maupun dalam Hukum Agama Hindu perkawinan itu dilarang apabila berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, saudara orang tua atau neneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

ibu/bapak tiri dan berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan.⁴³

Berdasarkan bab atau *Adhyaya* atau buku dari kitab Manawasharmasastra III.21 maka dikenal delapan cara perkawinan menurut hukum Hindu dan semua cara itu secara definitif disebutkan nama-namanya. Adapun kedelapan macam cara itu, tidak semuanya dapat dilakukan karena dari kedelapan cara perkawinan tersebut ada yang membawa pahala dan ada yang membawa derita.

Adapun dalam Kitab Manawadharmasastra perkawinan di Bali ada 8 (delapan) jenis perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. *Brahma Wiwaha* adalah Pemberian seorang gadis setelah terlebih dulu dirias (dengan pakaian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang yang ahli dalam Veda, dan dengan budi bahasa yang baik, yang diundang (oleh ayah si wanita).
2. *Daiwa Wiwaha* adalah Pemberian seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara berlangsung
3. *Arsa Wiwaha* : Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari penganten pria untuk memenuhi peraturan dharma.
4. *Prajapati Wiwaha* : Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra “semoga

⁴³ *Ibid* hlm 26.

kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama”. Dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada penganten pria).

5. *Asura Wiwaha* : Kalau penganten pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberingas kawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya.
6. *Gandharma Wiwaha* : Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan melakukan perhubungan kelamin.
7. *Raksasa Wiwaha* : Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak
8. *Paisca Wiwaha* : Kalau seorang laki-laki dengan cara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan “*Paisca*” yang amat rendah dan penus dosa⁴⁴

Berdasarkan tradisi atau hukum adat atau yang berlaku di Bali terdapat 4 (empat) sistem perkawinan yang dapat dilakukan, disamping itu terdapat sistem perkawinan yang dilarang untuk dipraktekkan karena bila dilakukan dapat melanggar hak azasi manusia serta dapat diancam hukuman pidana dan perkawinan yang dilakukan dapat batal demi hukum.⁴⁵

⁴⁴Wayan Eka. *Jenis-jenis Perkawinan pada Masyarakat Bali*. Dalam <http://www.senaya.web.id/> di akses pada tanggal 23 Februari 2017

⁴⁵ I Made Rudita. 2015. *Hak Azasi Manusia dan Perkawinan Hindu*. Jurnal Advokasi Vol.5 No.1 Maret 2015

1. Sistem *mepadik*/meminang yaitu bentuk perkawinan dimana pihak calon mempelai laki-laki datang beserta keluarganya ke rumah calon wanita untuk meminang calon isterinya tersebut. Biasanya kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan sudah membuat kesepakatan untuk membangun rumah tangga. Dalam masyarakat Bali sistem perkawinan ini di anggap sistem perkawinan terhormat.
2. Sistem *ngerorod* yaitu bentuk perkawinan atas dasar suka sama suka antara kedua calon mempelai yang sudah cukup umur untuk membina rumah tangga. Sistem seperti ini disebut dengan sistem kawin lari.
3. Sistem *Nyentana* atau *nyeburin* adalah perkawinan yang didasari oleh perubahan status hukum dimana mempelai perempuan berubah status menjadi purusa dan mempelai laki-laki berubah status menjadi pradana. Dalam hal ini mempelai laki-laki harus tinggal di kediaman isteri.
4. Sistem *Melegendang* yaitu bentuk perkawinan dengan cara paksa tanpa didasari rasa cinta sama cinta, suka sama suka, jenis perkawinan ini sama halnya dengan Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha dalam Kitab Manawadharmasastra.

Adapun sistem perkawinan yang disebut *melegendang* kurang mendapat apresiasi dan sangat jarang sekali ditemui dalam prakteknya karena sistem perkawinan ini benar-benar melanggar HAM dan dapat dikenakan ancaman pidana bagi para pelakunya. Sistem perkawinan *melegendang* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan tanpa persetujuan calon isteri.

Jadi bentuk perkawinan seperti ini adalah suatu bentuk pemerkosaan kepada seorang wanita dan tidak dapat disahkan sebagai suatu bentuk perkawinan.

Selain sistem perkawinan yang telah disebutkan di atas, ada sebuah sistem perkawinan baru yang mulai banyak dilakukan oleh pasangan suami isteri. Sistem perkawinan itu dikenal dengan sistem perkawinan *pada gelahang* yang secara harfiah mengandung arti ‘sama-sama memiliki’ atau ada juga yang masyarakat menyebutnya dengan sistem perkawinan *negen dadue* yang secara harfiah mengandung arti ‘memikul dua’. Sistem perkawinan *pada gelahang* atau *negen dadue* ini adalah suatu sistem perkawinan alternatif yang coba ditawarkan sebagai bentuk solusi bagi orang tua yang hanya memiliki putra atau putri tunggal. Pada sistem perkawinan jenis ini, si isteri tidak perlu meninggalkan keluarganya demikian juga si suami tidak perlu meninggalkan keluarganya. Pasangan suami isteri “dimiliki bersama” antara keluarga isteri dan keluarga suami, disamping itu juga mempunyai tanggung jawab “memikul dua” beban baik di tempat isteri maupun di tempat suami.⁴⁶

Pada saat ini tidak semua perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, tetapi menurut hukum adat Bali yang masih hidup sampai saat sekarang ini, hanya mengenal adanya 2 (dua) cara perkawinan yaitu bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan *Nyentana*. Bali mempunyai tradisi sendiri dalam melaksanakan upacara perkawinannya. Perkawinan di Bali sendiri dipengaruhi oleh sistem Kasta, sistem kasta di Bali antara lain : (1) Brahmana, (2) Ksatria,

⁴⁶ *Ibid* hlm 65.

(3) Waisya dan (4) Sudra. Sistem kasta berdampak pada tata upacara perkawinan.⁴⁷

Sejalan dengan sistem patrilineal yang dianut masyarakat hukum adat Bali, perkawinan yang biasa digunakan adalah perkawinan biasa. Sesuai dengan namanya, perkawinan biasa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan Hindu di Bali yang diadakan di rumah keluarga besar suami. Perempuan dilamar sebelumnya, dalam perkawinan ini suami dikatakan berstatus sebagai *purusa* yang mempunyai hak dan kewajiban di rumahnya. Perempuan yang menjadi istri akan meminta doa restu pada leluhur di tempat sembahyang keluarga asal setelah kawin. Konsekuensi dari sistem kekeluargaan patrilineal atau *kapurusa* yang diikuti, selanjutnya dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu⁴⁸:

1. Perkawinan biasa atau dikenal dengan *nganten biasa*, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya;
2. Perkawinan *Nyentana* atau *nyeburin*, dalam hal ini pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus wanita atau *pradana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *Purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan

⁴⁷ Ni Putu Delia Wulansari. 2015. *Bentuk, Fungsi, dan Makna Tata Rias dan Prosesi Upacara Perkawinan Bali Agung di Bali*. E-Journal Volume 04 Nomor 02 Tahun 2015. Hlm 30.

⁴⁸ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Universitas Udayana, Denpasar, Hlm. 85.

dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *Nyentana* berstatus sebagai *Sentana Rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya.

Dalam masyarakat adat di Bali status hukum suami isteri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya. Status atau kedudukan hukum seseorang didalam keluarga sangat penting artinya dalam hukum adat Bali karena akan mempengaruhi hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharma*) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat (*banjar/desa pakraman*) *swadharma* dan *swadikara* dalam keluarga misalnya menyangkut tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua dimasa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan serta pemujaan terhadap tempat persembahyangan keluarga (*sanggahmerajan*) dimana roh leluhur tersebut disemayamkan.⁴⁹

4. Pewarisan Adat di Bali

Hukum adat Bali yang bersistem kekeluargaan *kapurusa* (patrilineal) menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami.

Hukum Pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari Hukum Adat Bali. Antara lain karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali (*Dasa Kala Patra*), baik mengenai (banyaknya) barang-barang

⁴⁹ Ni Ketut Sri Adnyani. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali di Tinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender*. UNDHKSA. Singaraja. Jurnal Vol.5 No1 April 2016.

yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan Pengadilan Adat⁵⁰

5. Hak Waris Laki-laki dalam Hukum Adat Bali

Anak laki-laki di Bali berkedudukan sebagai ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. Pengagungan terhadap anak laki-laki menyebabkan anak perempuan dianggap sebagai nomor dua dan tidak mendapat perhatian lebih.⁵¹

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Bali, dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya.

Dalam hal ini, anak laki-laki memelihara tempat sembayang keluarga dan mengurus segala upacara untuk leluhur dan kewajiban agama dan adat lain, bersama dengan istrinya. Oleh karena itu, anak laki-laki yang statusnya *purusa* dapat seluruh harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Selain itu, laki-laki *purusa* juga mengelola sepertiga harta bersama (harta *guna kaya*) orang tua agar bisa menjalankan kewajiban tersebut.⁵²

6. Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Bali

Sistem kekeluargaan *kapurusa* yang diterapkan selama ini dalam masyarakat Bali memang telah memberi perlakuan berbeda antara anak laki-

⁵⁰ Gede Penetje.2004. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar. CV Kayumas Agung. Hlm 101

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

laki dan perempuan di bidang pewarisan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa perlakuan berbeda itu wajar karena esensi pewarisan dalam hukum adat Bali adalah keseimbangan antara hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharma*). Dalam hal ada kenyataan bahwa salah satu pihak (laki-laki) tetap melaksanakan kewajibannya dalam keluarga dan ada pihak lain (perempuan) meninggalkan kewajibannya, maka logis bila hak mereka masing-masing terhadap harta orang tuanya juga menjadi berbeda. Manu Smerti mengumpamakan perempuan diumpamakan seperti bumi/pertiwi/tanah dan laki-laki adalah benih atau bibit, antara bumi dan bibit mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam menciptakan kehidupan.

Dirumuskan dalam kitab suci Hindu yang menjadi dasar moral dan spirit hukum Adat Bali, bagaimana kemudian dituangkan dalam bentuk norma dalam hukum adat, dan menghasilkan sistem kewarisan menurut garis "*purusa*" yang sepenuhnya tidak identik dengan dengan garis lurus laki-laki, karena perempuanpun bisa menjadi "*Sentana Rajeg*" sebagai penerus kedudukan sebagai kepala keluarga dan penerus keturunan keluarga, tapi bila keluarga itu memiliki anak perempuan dan laki-laki hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Sangat jelas sekali anak perempuan apalagi sudah kawin keluar, maka ia tidak berhak mewaris dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga pihak suami selama perkawinannya⁵³

Secara singkat hak waris anak perempuan menurut keputusan pasamuhan agung III 2010 adalah sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum adat Prof. Dr.

⁵³ Ni Ketut Sri Utari. *Mengikis Ketidaksetaraan Gender Dalam Hukum Adat Bali*. Paper Fakultas Hukum UNUD. Hlm 2.

Wayan P. Windia SH Msi sebagai berikut: “Sesudah 2010 wanita bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali No 1/Kep/PSM/3MDP Bali /X/2010, pada 15 Oktober 2010 dalam SK ini wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong $\frac{1}{3}$ untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian”.

